



BUPATI MINAHASA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang *A*.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN *f.*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.248.949.971.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 86.405.430.000,00 (delapan puluh enam milyar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 44.878.800.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.522.411.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.854.219.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.685.500.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.392.500.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.144.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.500.000.000,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (h) huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.300.000.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 15.886.300.000,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.494.086.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.528.325.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pasal 8

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Pendapatan BLUD

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.239.219.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.138.640.171.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.088.420.171.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.220.000.000,00 (lima puluh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
 - c. Dana Desa
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 916.571.416.000,00 (sembilan ratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.876.233.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 160.972.522.000,00 (seratus enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.009.178.000,00 (tiga puluh lima milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 614.935.145.000 (enam ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 94.898.463.000 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 171.728.630.000 (seratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan Rp 50.220.000.000,00 (lima puluh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 18

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 318.304.660.870,00 (tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pasal 19

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 63.093.388.161,00 (enam puluh tiga milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Pasal 20

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 143.795.714.945,00 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
- c. Belanja Sewa Tanah
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
- g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
- h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 21

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp 7.441.317.908,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Pasal 22

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp 42.724.618.076,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 23

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp 1.596.395.795,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pasal 24

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp 25.536.426.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g direncanakan sebesar Rp 34.116.799.985,00 (tiga puluh empat milyar seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.095.294.885,00 (lima milyar sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 27

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp 29.436.738.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f direncanakan sebesar Rp 368.800.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Pasal 29

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 134.071.065.194,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- e. Belanja Modal Aset Lainnya

- (2) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 24.713.975.606,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Besar
 - Belanja Modal Alat Angkutan
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - Belanja Modal Alat Laboratorium
 - Belanja Modal Komputer
 - Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
- (3) Anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 66.248.943.138,00 (enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung
 - Belanja Modal Monumen
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (4) Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.646.263.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan
 - Belanja Modal Bangunan Air
 - Belanja Modal Jaringan
- (5) Anggaran belanja Modal Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.461.883.450,00 (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp 22.962.259.659,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp 239.462.797.400,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bantuan Keuangan

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.405.430.000
4.1.01	Pajak Daerah	44.878.800.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.685.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.500.000.000
4.1.01.06.02	Pajak Motel	157.500.000
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	157.500.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	7.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	7.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	21.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	21.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.392.500.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.120.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	87.500.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	87.500.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.835.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.835.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	75.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	75.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	75.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.144.500.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.050.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.050.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	70.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	70.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	14.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	14.000.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	7.000.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	7.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3.500.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	3.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	15.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	15.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	15.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.650.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.650.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.650.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.300.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	5.300.000.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.300.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.886.300.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.886.300.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.886.300.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.522.411.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.494.086.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	278.986.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	278.986.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.100.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.100.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.500.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.500.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.528.325.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.466.325.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.466.325.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.150.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.150.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.150.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.150.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.854.219.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	15.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	15.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.239.219.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.189.219.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.189.219.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	15.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	15.000.000
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	15.000.000
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	15.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	600.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.138.640.171.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.420.171.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	916.571.416.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.009.178.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.715.939.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.739.819.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.989.533.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.644.156.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	905.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	614.935.145.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	614.935.145.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	94.898.463.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	290.167.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.410.804.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.042.695.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.286.502.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.878.668.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.957.262.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.491.904.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.964.542.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.446.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.949.368.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.799.996.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.080.795.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.072.856.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.948.763.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	25.278.141.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	171.728.630.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	42.560.710.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.588.578.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	948.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.969.670.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.316.480.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.726.418.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	65.265.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.505.793.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	360.216.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	687.500.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.876.233.000
4.2.01.02.01	DID	10.876.233.000
4.2.01.02.01.0001	DID	10.876.233.000
4.2.01.05	Dana Desa	160.972.522.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	160.972.522.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	160.972.522.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.220.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.220.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.220.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.200.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.440.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	780.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.800.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.904.370.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.759.850.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.759.850.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	3.759.850.000
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	3.759.850.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.144.520.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.144.520.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.144.520.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	20.144.520.000
	Jumlah Pendapatan	1.248.949.971.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	915.845.354.826
5.1.01	Belanja Pegawai	562.639.861.071
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	348.811.324.785
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	253.201.471.311
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	238.266.923.711
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.934.547.600
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.299.631.098
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.209.625.054
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.090.006.044
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.992.459.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.992.459.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.556.474.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.837.898.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.718.576.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.595.080.982
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.595.080.982
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.795.070.640
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.391.136.584
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.403.934.056
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	852.763.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	720.626.072
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	132.136.928
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.575.106
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.117.572
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	457.534
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.417.612.460
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.579.190.314
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	838.422.146
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.116.866.668
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.076.019.695
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	40.846.973
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.569.343.022
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.446.802.116
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	122.540.906
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.407.977.498
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.407.977.498
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	86.412.596.400
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	85.609.796.400
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	84.769.736.400
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	840.060.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	802.800.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	802.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92.917.098.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	265.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	265.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	91.588.578.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	91.588.578.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	948.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	948.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	100.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	85.320.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.040.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.989.106.662
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.216.600
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.216.600
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.725.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.725.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	376.194
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	376.194
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.596
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.596
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.338.635.072
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	88.200.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.608.768
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.826.304
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.244.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.952.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.952.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.177.724
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	71.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	71.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.354.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.354.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.355.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.355.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.411.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.411.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.212.724
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.212.724
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	149.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	149.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	447.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	447.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	522.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	412.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	412.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	10.640.177.500
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	10.640.177.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	10.640.177.500
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.154.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	6.154.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	6.154.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.304.660.870
5.1.02.01	Belanja Barang	63.093.388.161
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.093.388.161
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	156.026.704
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.106.640
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	767.962.516
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.455.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	386.861.940
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.390.405.968
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	111.993.760
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	51.614.550
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.573.007.332
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.177.877.072
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.266.972.742
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	272.920.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.479.389.847
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.276.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	365.406.036
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	32.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	185.816.715
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	293.129.074
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.723.435.269
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	823.989.132
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.692.030.956
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.846.114.840
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	50.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.431.788.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.061.505.240

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14.828.880
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	713.850.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	9.650.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	710.304.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.170.850
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	417.400.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	296.250.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	539.324.798
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	236.650.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	55.600.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	153.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	196.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	380.773.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	176.000.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.795.714.945
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	113.106.305.191
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.272.765.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.950.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	150.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	36.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	28.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	65.200.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	270.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.402.105.996
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.596.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	150.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	120.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	777.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.739.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.193.368.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.831.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.666.680.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.228.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.685.440.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	476.181.460
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	358.300.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	106.750.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.091.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	83.301.320
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.399.840.015
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	94.317.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.919.229.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	205.076.900
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	203.100.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.991.613.804
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.621.240.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.346.373.804
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.800.000.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.224.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.842.018.750
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	675.215.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	510.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	600.803.750
5.1.02.02.04.0462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya	56.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	587.977.500
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	317.727.500
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	270.250.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	49.500
5.1.02.02.07.0036	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	49.500
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.251.421.700
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	56.300.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	200.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	435.024.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	30.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	425.247.700
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	104.850.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	432.382.500
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	432.382.500
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	583.946.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	133.946.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	450.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.441.317.908
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	253.594.296
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	154.594.296
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	99.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.944.508.412
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.303.997.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	179.193.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.602.390.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	241.754.162
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.071.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.759.000
5.1.02.03.02.0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	75.980.400
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	348.184.850
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	94.681.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	47.058.000
5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	440.000
5.1.02.03.02.0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	2.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	693.215.200
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	404.015.200
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	289.200.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.000.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	450.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	42.724.618.076
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.411.330.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.542.369.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.655.705.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.710.188.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	503.068.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.313.287.876
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	1.313.287.876
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.596.395.795
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.596.395.795
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	484.055.795
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.112.340.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.536.426.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.536.426.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.536.426.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.116.799.985
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.116.799.985
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.116.799.985
5.1.03	Belanja Bunga	5.095.294.885
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.095.294.885
5.1.03.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	5.095.294.885
5.1.03.03.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	5.095.294.885
5.1.05	Belanja Hibah	29.436.738.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.036.150.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.430.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.430.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.856.150.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.856.150.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.750.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.750.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.400.588.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.400.588.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.400.588.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	368.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	50.400.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	50.400.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	50.400.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	78.400.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	78.400.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	78.400.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	240.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	240.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	240.000.000
5.2	BELANJA MODAL	134.071.065.194
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.713.975.606
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	136.853.100

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	136.853.100
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	133.480.530
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.372.570
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.000.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.319.612.322
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	597.041.850
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	597.041.850
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.205.713.972
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	115.464.200
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.043.112.927
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	47.136.845
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	516.856.500
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	68.552.820
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	133.812.360
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	14.089.680
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	221.041.260
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	79.360.380
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	140.592.100
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	118.592.100
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	118.592.100
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	22.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	22.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.333.915.164
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.241.369.305
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.823.096.673
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	216.600
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	3.642.903.200
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.775.152.832
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	92.545.859
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	92.545.859
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.264.785.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.000.000.000
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	4.000.000.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	264.785.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	264.785.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.021.040.512
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	954.158.420
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	929.158.420
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.066.882.092
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	76.279.536
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.975.521.484
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.081.072
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	90.344.450
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	90.344.450
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	90.344.450
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	225.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	225.000.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	225.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	30.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.151.832.958
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.151.832.958
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.151.832.958
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.248.943.138
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	65.936.983.138
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.936.983.138
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.734.857.659
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	947.468.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	48.000.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.630.072.120
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	125.617.360
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	451.157.999
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47.810.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	81.960.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	81.960.000
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	81.960.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	230.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	230.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	230.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.646.263.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.742.500.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	19.742.500.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	19.742.500.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.903.763.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.213.763.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.213.763.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	690.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Perumahan Sungai/Pantai	690.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	14.000.000.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	14.000.000.000
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	14.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.461.883.450
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.776.950
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	2.776.950
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	2.776.950
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	75.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.384.106.500
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.384.106.500
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.384.106.500
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.962.259.659
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.962.259.659
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.962.259.659
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.962.259.659
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	22.962.259.659
5.4	BELANJA TRANSFER	239.462.797.400
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.940.121.100
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.487.880.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.487.880.000

KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.487.880.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	452.241.100
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	452.241.100
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	452.241.100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.522.676.300
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	234.522.676.300
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	64.994.532.300
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	64.994.532.300
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	169.528.144.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	169.528.144.000
	Jumlah Belanja	1.312.341.477.079
	Total Surplus/(Defisit)	(63.391.506.079)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.391.506.079
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.391.506.079
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000.000
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.500.000.000
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	2.500.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	9.050.000.000
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	9.050.000.000
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	9.050.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	24.341.506.079
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	24.341.506.079
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	14.750.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	6.591.506.079
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	48.000.000.000
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.000.000.000
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	48.000.000.000
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	48.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	87.391.506.079
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	24.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	24.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	24.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.000.000.000
	Pembayaan Netto	63.391.506.079


 Bupati Minahasa
 Rocky Octavian Roring